

REKONSTRUKSI JEMBATAN CH, TINGKATKAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH



PROFESI

Presdir PT Buka Teknik Utama Tbk.: Kami Pemrakarsa Proyek KPBu Jembatan CH Di Jawa

8

ISU

Kementerian PUPR dan World Bank Laksanakan Closing Workshop NAHP

22

FILM INFRASTRUKTUR KING KONG

34



SUSUNAN REDAKSI VFM 2023

PELINDUNG

Dr. Ir. Herry Trisaputra Zuna, S.E., M.T.

PENASIHAT

Sudiro Roi Santoso, S.T., M.T.

PENGARAH

Agus Sulaeman, ST, MM
 Ir. Arvi Argyantoro, MA
 Reni Ahiantini, ST, M.Sc
 Meike Kencanawulan Martawidjaja, S.T, MDM
 R. Haryo Bakti Martoyoedo, ST, M.Sc

TIM REDAKSI

Shara Vadya, S.Ikom
 Stephanes M. Anugerah R, S.Kom
 Sopan Sopian, S.Sn
 Ervin Supriyanto, ST
 Novi Riandini, S.Kom
 Indah Pratiwi, S.Sos., M.Si
 Nurul Qolbi, SE., M.Sc
 Rika Andriani, SE., MM
 Rifki Maudianda, SE., MBA

REPORTER

Komarudin
 Dwi Cristanto

SEKRETARIAT & SIRKULASI

Yudhistira Adi Nugroho, SH., MH.
 Dony Triastomo, SE, MM

PEMIMPIN REDAKSI

Anggoro Widyastika, SH, MH

REDAKTUR PELAKSANA

Fenty Meilisya Syafril, S.Sos, M.Si

EDITOR

Putrawan, SH
 Ruby Esti Aprilia, SH, MH

Rizki Akbar Maulana, S.Kom., ME., MPP
 Glenn Edo Prasetyo Roosland, SIA., MM
 Eka Parlita Dewi, SE
 Reina Rivenska Disa, ST
 Sri Rahmi Purnamasari, M.A
 Gunawan Satyono
 Muhamad Ihsan
 Nini Sunny
 Kasih Octoriza

DESAINER

Fahmi Nurhuda, S.Ds.
 Michael Adha

ALAMAT REDAKSI

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
 Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 Jalan Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru,
 Jakarta Selatan, 12110
 Telepon/Fax: (021) 7200793
 Email: redaksivfm@pu.go.id

DITERBITKAN OLEH

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
 Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

AGENDA PENTING 2023 DJPI

Sepanjang Tahun 2023, redaksi mencatat ada tiga hal utama yang menjadi fokus yang dibahas untuk Edisi 1 VFM Tahun 2023. Fokus pertama tentu saja terkait dengan tema utama VFM yaitu Rekonstruksi Jembatan CH, tingkatkan Konektivitas Antar Wilayah. Program Rekonstruksi Jembatan khususnya Jembatan CH, saat ini terus digenjot dan masih dalam tahap rekonstruksi. Jembatan CH yang direkonstruksi melalui skema KPBU ini akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat karena dapat menghidupkan aktivitas ekonomi dan juga menghubungkan (konektivitas) antar wilayah. Alasan inilah yang membuat redaksi menjadikannya sebagai liputan utama.

Agenda penting lainnya yang saat ini sedang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) adalah pelaksanaan *Side Event* (rangkaian *event*) berupa Seminar/Workshop Series dalam rangka Road to The 10th World Water Forum 2024. Sepanjang Tahun 2023, DJPI telah melaksanakan tiga kali Seminar/Workshop terkait dengan sub tema *Sustainable Water Finance* untuk mendukung tema utama World Water Forum 2024 yaitu *Water for Shared Prosperity*. Seminar Pertama mengusung topik "*Government Support and Private Sectors' Perspective on Public-Private Partnership (PPP) for Water Resources Infrastructure*" telah dilaksanakan pada bulan Februari 2023, di Jakarta, dan Workshop kedua dengan topik "*Blended Finance for Water Sector*" telah dilaksanakan pada bulan Maret 2023 di Bandung. Pada awal bulan Juli ini, DJPI juga telah melaksanakan Workshop ketiga dengan topik "*Secure and Increase Funding for Basic Access to*

Safe Water and Sanitation for All at All Scales" di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Provinsi DIY. Seminar/Workshop dilaksanakan dengan tujuan untuk mendiskusikan tantangan dan solusi terkait dengan *Sustainable Water Finance* (Pembiayaan Sektor Air yang Berkelanjutan).

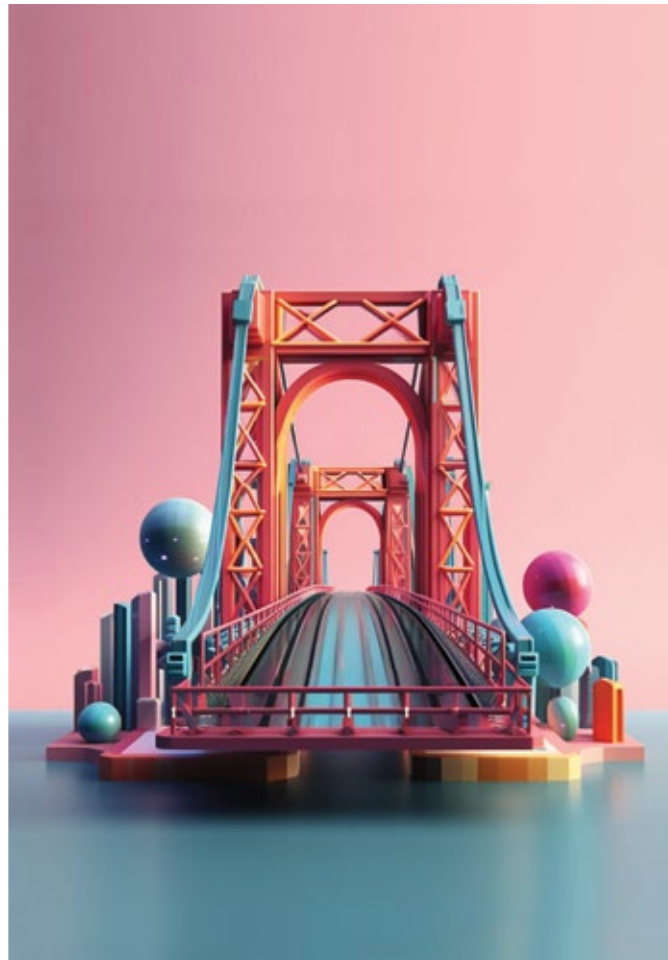
Selain itu, pada bulan Mei 2023, Kementerian PUPR bekerjasama dengan *World Bank* (WB)/ Bank Dunia melaksanakan acara *Closing Workshop National Affordable Housing Program* (NAHP) yang diselenggarakan di Jakarta. Acara workshop ini merupakan forum pertemuan untuk menyampaikan capaian kinerja, pembelajaran dan manfaat pelaksanaan kegiatan NAHP sekaligus menandai telah berakhirnya kerjasama dengan *World Bank* melalui program NAHP. NAHP didukung oleh *World Bank* melalui pinjaman sebesar 450 juta USD. Program NAHP ini bertujuan untuk mengatasi tantangan menahun yang dialami oleh penduduk Indonesia dalam mendapatkan rumah yang terjangkau dengan mengembangkan peta jalan yang lebih solid menuju sektor perumahan yang lebih layak, inklusif, aman dan tangguh. NAHP ini dilaksanakan sejak Januari 2018-Februari 2023 dengan target sasaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui tiga komponen yaitu: Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan Dukungan Teknis terhadap reformasi program dan kebijakan perumahan.

Meskipun ada Program yang telah berakhir, namun kita harus dapat mengambil hikmah atau pelajaran/*lesson learned* untuk perbaikan di masa mendatang dan untuk program yang masih terus berjalan, kita harus optimis dapat menyelesaikannya dengan baik dan dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat banyak. Akhirnya, kami dari redaksi mengucapkan selamat membaca untuk Edisi 1 VFM tahun 2023.

REKONSTRUKSI JEMBATAN CH, TINGKATKAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

Sebagai upaya menjawab tantangan anggaran dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, Kementerian PUPR terus mendorong inovasi pembiayaan alternatif salah satunya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU ini salah satunya diterapkan pada proyek penggantian dan/atau duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa, dan soal Jembatan CH ini pula yang menjadi bahasan utama dalam VFM edisi kali ini.

Ilustrasi jembatan besi 3D pada sampul muka, mewakili perkembangan, pembangunan dan rekonstruksi jembatan masa depan di seluruh Nusantara. Visual dibuat dengan komposisi warna dan aksen yang merepresentasikan arsitektur futuristik yaitu konsep bangunan masa depan nan modern.



SAMPUL

Ilustrasi dibuat oleh *artificial intelligence (AI)* melalui *platform midjourney* dengan konsep *futuristic steel bridge*.

RINGKASAN SIMPUL

DJPI Gelar *Market Consultation* Untuk Dua Proyek KPBU

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melaksanakan *Market Consultation* di Jakarta, Selasa (16/05/2023).

Kegiatan yang merupakan lanjutan rangkaian kegiatan *Market Sounding* yang telah dilaksanakan pada 7 Maret 2023, ditujukan untuk memperoleh masukan, tanggapan, dan minat dari calon investor atas rencana pembangunan dua Proyek KPBU atas Prakarsa Pemerintah, yaitu Proyek KPBU Jalan Tol Demak-Tuban dan Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik.

Proyek Jalan Tol Demak-Tuban mempunyai nilai investasi sebesar Rp 49,607 T, panjang 179,55 Km, dengan masa konsesi

selama 50 tahun dengan skema pengembalian investasi berupa pembayaran pengguna layanan (*user charge*).

Sementara Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik mempunyai nilai investasi sebesar Rp 23,33 T, panjang 61,968 Km, dengan masa konsesi selama 50 tahun dengan skema pengembalian investasi berupa pembayaran pengguna layanan.

Proyek Jalan Tol Demak-Tuban akan menjadi bagian jalan tol lintas pantai utara yang terhubung dengan tol trans Jawa. Di mana titik awal proyek ini terhubung dengan jalur tol Semarang-Demak yang nantinya akan terhubung langsung dengan jalan tol Tuban-Babat-Lamongan hingga berakhir di Gresik, Jawa Timur.

Ke depan, proyek ini akan mempermudah aksesibilitas

masyarakat serta mendukung mobilitas rencana pembangunan kilang minyak Pertamina yang ada di Tuban dan rencana Kawasan Ekonomi Khusus di Gresik Jawa Timur.

Peserta dalam acara ini terdiri dari 7 (tujuh) perusahaan yang telah menyampaikan *Letter of Intent (LoI)* pada acara *Market Sounding*, yaitu: PT Brantas Abipraya (Persero), *Japan International Cooperation Agency*, PT Nindya Karya (Persero), *China Railway Construction Company International Investment Ltd*, PT Pembangunan Investasi Indonesia, PT Hutama Karya (Persero) dan *China Road and Bridge Construction*.

Detail lebih lengkap terkait Simpul KPBU bisa diakses melalui email:

simpulkpbu@pu.go.id

8

PROFESI
**KAMI PEMRAKARSA PROYEK
KPBH JEMBATAN CH DI JAWA**



12

LAPORAN UTAMA
**PENGANTIAN 37 JEMBATAN CH DI PULAU JAWA,
GUNAKAN SKEMA KPBH**



18

CERITA LOKASI
2 JEMBATAN CISADANE



22

ISU
**KEMNUPR DAN WORLD BANK LAKSANAKAN
CLOSING WORKSHOP NAHP**

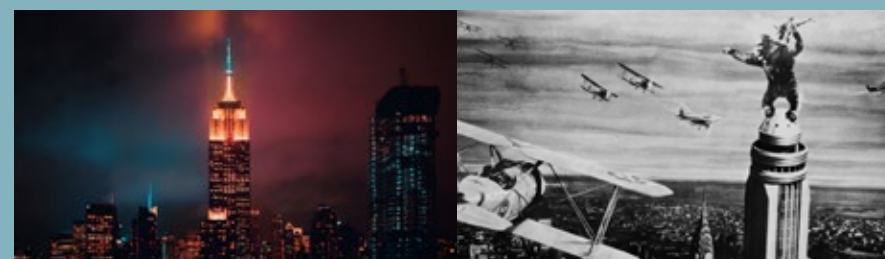


26

GOESAN INFRASTRUKTUR
**WATER WORLD
FORUM 2024**

30

OPINI
**DJPI SEBAGAI
KNOWLEDGE CENTER**



34

FILM INFRASTRUKTUR
KING KONG



38

LENSA

46

SALING BICARA
SUBSIDI SBUM

BUDI HARTONO

PRESIDENT DIRECTOR PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK

KAMI PEMRAKARSA PROYEK KPBU JEMBATAN CH DI JAWA



PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK) meraih kontrak kerja sama untuk proyek penggantian dan/ duplikasi jembatan Callender Hamilton (CH) di Jawa.

BUKK melalui anak usaha PT Baja Titian Utama menandatangani perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai investasi sebesar Rp2,19 triliun.

BUKK melaksanakan proyek pada 37 lokasi jembatan yang tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan perjanjian berjangka waktu hingga 12 tahun. Terdiri dari dua tahun masa konstruksi dan sepuluh tahun masa layanan. Anak usaha PT Bukaka Teknik Utama Tbk. akan memperoleh pembayaran setelah masa konstruksi selesai melalui skema pembayaran ketersediaan layanan selama 10 tahun.

Untuk mendapat informasi lebih jauh tentang pelaksanaan proyek jembatan CH sekaligus tanggapan tentang pelaksanaan KPBU, Majalah VFM mewawancarai President Director PT Baja Titian Utama, Budi Hartono secara tertulis. Berikut petikan wawancara tersebut :

Apa alasan ketertarikan Badan Usaha untuk ikut serta dalam Pembiayaan Penggantian Jembatan CH?

Berdasarkan komitmen inovasi dan ekspansi bisnis dari PT Bukaka Teknik Utama Tbk. pada tahun 2020 kami mengajukan prakarsa proyek KPBU Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa. Prakarsa ini kami ajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini kepada Menteri PUPR RI sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas pengelolaan jembatan sebagaimana dimaksud.

PT Bukaka Teknik Utama Tbk selama berdiri sejak tahun 1978, belum pernah terlibat secara langsung dalam bisnis dengan mekanisme KPBU, atas hal tersebut, ditambah dengan penelaahan bisnis dan risiko terhadap mekanisme KPBU yang ada di Indonesia, kami tertarik untuk mencoba dan terlibat secara langsung dalam mekanisme KPBU ini.

Hal ini akan menjadi pengalaman pertama dan tentunya sangat berharga bagi kami dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi Perusahaan di bidang bisnis konstruksi, melalui pengembangan dan



ekspansi mekanisme bisnis yang kami ikuti dan kami berharap proyek KPBU Jembatan CH ini akan menjadi *pilot project* kami untuk menjajaki mekanisme KPBU lainnya yang sesuai dengan lini bisnis PT Bukaka Teknik Utama Tbk.

Bagaimana proses penyajian kajian studi kelayakan untuk jembatan CH? Apakah ada tantangan dalam penyiapan hal tersebut?

Mengingat proyek KPBU ini adalah proyek KPBU pertama bagi BUKK maka tentu segala aspek dalam proses pelaksanaan proyek KPBU ini menjadi suatu tantangan bagi kami. Mulai dari tahap pengajuan prakarsa kepada Kementerian PUPR, tahapan pelelangan KPBU, tahap pembiayaan sampai dengan tahap pelaksanaan konstruksi.

Dalam tahap pengajuan prakarsa dimana salah satu yang harus kami lakukan adalah menyiapkan studi kelayakan atas proyek yang kami ajukan, beberapa tantangan yang kami hadapi adalah kewajiban kami untuk mengembangkan *mindset* dan *point of view* yang selama ini kami miliki, dimana sebelumnya kami lebih banyak bergerak dalam proses konstruksi fisik namun dalam kegiatan ini, kami harus menyusun semuanya dari awal termasuk kajian atas studi kelayakan tersebut.

Dengan bekerjasama dalam tim yang solid, kami dapat menyelesaikan penyusunan kajian studi kelayakan tersebut dan proyek KPBU yang kami prakarsai dapat diterima oleh

Kementerian PUPR dan berjalan sampai dengan saat ini (masa konstruksi yang sedang kami laksanakan).

Bisa diceritakan bagaimana Value for Money (VfM) ketika dilakukan penghitungan, sehingga Jembatan CH ini layak untuk di-KPBU-kan?

Untuk melakukan penilaian terhadap *Value for Money* proyek penggantian jembatan CH, maka digunakan pendekatan komparasi seluruh komponen biaya yang diperlukan baik untuk skenario Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat KPBJ, adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa, maupun KPBU. Agar perbandingan dapat dilakukan secara *fair-enough*, maka asumsi biaya proyek untuk pekerjaan ini adalah sama. Namun seluruh resiko yang masih melekat pada masing-masing pihak tetap akan diperhitungkan sebagai bagian dari siklus proyek tersebut.

Sebagai contoh, pendekatan realistis terhadap keterbatasan anggaran APBN dalam melakukan pembangunan per tahun dimana pada saat ini diasumsikan penggantian tiga jembatan per tahun. Dengan demikian, terdapat resiko peningkatan biaya konstruksi dan peningkatan biaya pemeliharaan yang masih harus di tanggung oleh pemerintah apabila proyek ini dilakukan dengan skenario KPBJ.

Analisa sensitivitas VfM juga dilakukan terhadap skenario yang mungkin saja terjadi apabila kemampuan anggaran pemerintah untuk penggantian jembatan CH ini, ditambah menjadi lima jembatan per tahun maka dapat diketahui apakah proyek ini masih cukup baik apabila menggunakan skenario KPBU *Availability Payment* (AP). Berdasarkan dua skenario tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan KPBU AP memberi manfaat lebih baik daripada KPBJ.

Tantangan terberat pada proses konstruksi jembatan CH?

Menjadi tantangan terberat pada proses konstruksi jembatan CH adalah pada Manajemen Konstruksi. Hal tersebut menjadi poin utama, dikarenakan waktu konstruksi yang hanya kurang dari dua tahun, lokasi pekerjaan yang tersebar di seluruh bagian pulau Jawa, dan identiknya kondisi lingkungan dan sosial yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan teknis hal ini perlu dikelola dengan baik dan cermat.

Bisa diceritakan bagaimana Badan Usaha ini menjadi pemenang lelang untuk penggantian Jembatan CH? Apa keistimewaan dari badan usaha ini?

Tahapan dalam mekanisme KPBU ini menurut kami cukup panjang, dalam kasus ini (KPBU Jembatan CH), dimulai dari kami sebagai pemrakarsa proyek KPBU mengajukan usulan/prakarsa kepada Kementerian PUPR agar proyek KPBU ini dapat dilaksanakan.

Usulan ini sudah kami lengkapi dengan seluruh dokumen-dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian setelah kami ditetapkan sebagai pemrakarsa proyek KPBU jembatan CH, proses dilanjutkan oleh Kementerian PUPR dengan melakukan tender/seleksi untuk menentukan badan usaha pemenang proyek KPBU, dan sudah tentu kami sebagai pemrakarsa proyek menjadi salah satu peserta tender/seleksi tersebut bersama dengan beberapa badan usaha lain di bidang konstruksi yang memang tertarik dengan proyek KPBU Jembatan CH ini.

Berdasarkan mekanisme tender/seleksi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR

tersebut, kami kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang. Kemudian kami wajib membentuk suatu badan usaha baru sebagai badan usaha pelaksana (BUP) proyek KPBU ini. Atas kewajiban tersebut, kami membentuk PT Baja Titian Utama sebagai Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Jembatan CH ini.

Seluruh tahapan proses tender/seleksi tersebut tentunya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, serta ketentuan khusus terkait Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di antaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, beserta dengan seluruh peraturan pelaksanaannya.

Poin utama yang menurut kami menjadi kekuatan, sehingga kami dapat memenangkan proses tender/seleksi tersebut adalah kami telah mengetahui seluk beluk proyek ini sejak awal mengingat kami adalah pemrakarsa proyek, serta tentu saja pengalaman kami dalam bidang konstruksi khususnya pengalaman kami dalam proyek penyediaan infrastruktur jembatan, dimana Jembatan menjadi salah satu lini bisnis andalan kami.▼

“
...dengan bekerja sama dalam tim yang solid, kami dapat menyelesaikan penyusunan kajian studi kelayakan tersebut dan proyek KPBU yang kami prakarsai dapat diterima oleh Kementerian PUPR dan berjalan sampai dengan saat ini...
”

- BUDI HARTONO -

President Director PT Bukaka Teknik Utama Tbk

PENGANTIAN 37 JEMBATAN CH DI PULAU JAWA, GUNAKAN SKEMA KPBU

Jembatan Callender Hamilton (CH) yang tersebar di pulau Jawa, dan dibangun sekitar tahun 1970-an, sudah memasuki usia 50 tahun.

Mengutip harian *Kompas* terbitan 23 Februari 2021, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, "Karena umur jembatan-jembatan CH sudah tua, dan dirasa mendesak, perlu segera dilakukan kegiatan penggantian jembatan."

KPBU AP SEBAGAI INOVASI

Pada tahap perencanaan awal penggantian/ duplikasi jembatan CH, ditemukan terdapat 41 titik jembatan CH di Pulau Jawa yang mendesak

harus segera diganti. Namun menurut Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Reni Ahiantini, dari jumlah 41 jembatan CH tersebut, ternyata biaya perbaikan 4 jembatan dialihkan menjadi biaya APBN.

"Menjadi 38 jembatan tapi kami menyebutnya 37, karena salah satu jembatan yakni Cisadane ada dua dalam satu lokasi, yakni Cisadane A dan Cisadane B yang dibiayai dengan Proyek KPBU. Ini adalah skema KPBU AP *Unsolicited* pertama. Sebelum ini belum pernah ada presedennya," kata Reni lagi.

Skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) merupakan skema yang memungkinkan Pemerintah untuk tidak bergantung pada APBN dalam penyediaan layanan infrastruktur. Sebagaimana kita ketahui, tersedianya layanan infrastruktur yang memadai di berbagai sektor, sejatinya merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Skema KPBU diperlukan karena adanya keterbatasan anggaran (*financing gap*) dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, sehingga

diperlukan *creative financing* sebagai solusi selain menggunakan dana APBN. Melalui Skema KPBU ini Pemerintah mengajak peran serta swasta berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur," ungkap Reni.

12 TAHUN MASA KONSESI

Reni Ahiantini mengatakan, Proyek KPBU penggantian dan/atau duplikasi 37 Jembatan CH ini menelan investasi sebesar Rp 2,199 triliun.

Trisula Lama, Jawa Timur
Foto: Dok. DJPI

“Dengan masa konsesi selama 12 tahun, yang terdiri dari 2 tahun masa konstruksi dan 10 tahun masa layanan,” ucap Reni .

Kerja sama tersebut menggunakan skema *design, build, operate, finance, maintain, dan transfer* (DBOFMT).

Tahap pengusahaan proyek KPBU telah melewati berbagai proses cukup panjang. Mulai dari tahapan perencanaan, penyiapan, dan transaksi hingga mendapatkan badan usaha pemenang lelang yaitu PT Bukaka Teknik Utama Tbk. Kemudian, PT Bukaka Teknik Utama membentuk PT Baja Titian Utama sebagai badan usaha pelaksana (BUP) proyek KPBU tersebut.

Pembangunan Jembatan CH dengan skema KPBU ini diharapkan dapat mengarahkan layanan infrastruktur yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Jembatan CH mendapatkan dukungan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengingat proyek ini menggunakan skema pengembalian investasi *availability payment* (AP) sebesar Rp 525,66 M/tahun.

“Dengan begitu, nantinya akan dibayarkan selama 10 tahun masa layanan dari periode 12 tahun masa kerjasamanya,” Reni menjelaskan.

65 PERSEN RAMPUNG

Proyek penggantian/duplikasi terhadap 37 jembatan CH telah dimulai sejak 2021. Memasuki Quartal pertama tahun 2023, sudah dua pertiga bagian yang selesai dan ini artinya konstruksi berjalan dengan progres yang tepat.

“Dari 37 jembatan, 14 jembatan yang ada di Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah fungsional. Malah progres fisiknya di atas target,” ungkap Reni Ahiantini.

Penanganan penggantian/duplikasi jembatan, memiliki tantangan tersendiri dibanding pekerjaan membangun jalan. Bila kegiatan penanganan jalan bisa dilakukan dengan penerapan manajemen lalu lintas yang relatif tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas, sedangkan untuk pengerjaan konstruksi jembatan bisa punya tantangan lain.



Ciasem, Jawa Barat
Foto: Dok. DJPI

“ Dari 37 jembatan, 14 jembatan yang ada di Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah fungsional. Malah progres fisiknya di atas target, ”

- RENI AHANTINI -
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Jalan dan Jembatan





Tajum Margasana, Jawa Tengah
Foto: Dok. DJPI

Misalnya, jika tiba-tiba debit air sungai naik gara-gara hujan, atau dibukanya pintu air, maka pengerjaan harus ditunda.

“Di luar itu, pipa PDAM maupun *fiber optic* yang terdapat di bawah jembatan pada saat teknis pengerjaan konstruksinya perlu berkoordinasi dengan instansi terkait dulu sebelum kita masuk ke sana, dan ini cukup memakan waktu”.

Sampai saat ini, Reni mengaku belum mendengar adanya keluhan masyarakat di sekitar jembatan yang merasa sangat terganggu karena perjalanan mereka terhambat.

Sejak dirancang kontruksi 37 jembatan CH, menurut Reni sudah diantisipasi dampak lalu lintas. Tentu masih ada kemacetan, meskipun tidak terlalu signifikan.

“Kalaupun ada suara atau permintaan masyarakat yang kita dengar, justru bukan soal lalu lintasnya, melainkan mereka berharap ada simbol kedaerahan yang bisa terlihat di jembatan tersebut, dan itu tidak bisa kita wujudkan karena menyangkut biaya konstruksi tersendiri,” ujar Reni.

Demi menjaga dan perawatan jembatan CH di masa depan, Reni menyebut telah bekerja sama dengan Ditjen Perhubungan Darat, untuk melakukan semacam seleksi kendaraan berat yang akan melewatinya.

“Jadi di beberapa lokasi ada unit jembatan timbang UPPKB* kemungkinan ada semacam timbangan sebelum menaiki atau melewati jembatan. Soalnya, jika kendaraan yang lewat masih saja tetap *overload*, ya sama saja. Usia jembatan, kan tergantung juga pada beban di atasnya” ungkap Reni di akhir wawancara.▼

*Note: UPPKB = Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor



ARCHIBALD MILNE HAMILTON: MERANCANG JEMBATAN CH KUAT & RINGKAS

Foto Oleh: [wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archibald_Milne_Hamilton.jpg)

Jembatan Callender Hamilton atau CH adalah rangkaian jembatan yang dibuat pertama kali oleh Insinyur Teknik Sipil asal Selandia Baru, Archibald Milne Hamilton (1898–1972).

Konsep perancangan jembatan Hamilton terinspirasi dari pekerjaan A.M Hamilton sendiri antara tahun 1928 dan 1932, saat ia jadi insinyur untuk pembangunan jalan buatan Inggris di Kurdistan, Irak. Jalan itu belakangan diberi nama sebagai Jalan Hamilton.

A.M Hamilton menggambarkan dengan rinci pembangunan jalan tersebut dalam bukunya, *Road Through Kurdistan: Travels in Northern Iraq*, 1937.

KOMPONEN SEDERHANA UNTUK MEDAN SULIT

Sepanjang bekerja untuk Irak, A.M Hamilton sadar membutuhkan jembatan yang kuat dan mudah disesuaikan, namun dibuat dari komponen sederhana, rangkanya dapat mudah diangkut, dan bisa didirikan di lokasi terpencil atau di medan yang sulit.

Archibald menemukan desain jembatan CH pada 1932, dan mematenkannya tahun 1935. Setahun kemudian, pada 1936 Hamilton dianugerahi hadiah uang senilai £4.000 oleh War Office untuk penggunaan awal jembatan karyanya.

Delapan belas tahun kemudian, Hamilton menerima hadiah dari Royal Commission on Awards to Inventors, dengan hadiah sebesar £10.000.

Dikutip dari Engineering New Zealand, jembatan CH dirancang dengan banyak tiang penopang dan menumpuk, dan saat itu dikenal sebagai jembatan paling ekonomis.

Konstruksi jembatan bisa dikerjakan dengan cepat lantaran komponennya memang sudah dirancang di pabrik. Bahkan, untuk menyusun rangka baja jembatan, bisa dilakukan oleh tenaga tidak terampil.

Hamilton merancang sistem jembatan CH dengan bagian-bagian jembatan dibaut menjadi satu perangkat. Jembatan ini menggunakan sistem Panel/Balok Lantai/Deck prefabrikasi yang dirancang bisa menjangkau panjang jembatan mulai dari 30 hingga 150 meter, dengan lebar jalan satu hingga tiga lajur atau lebih.

Desainnya menggunakan *Warren truss* (tipe jembatan rangka dengan rangka utama berbentuk trapesium dari serangkaian segitiga) dan dipusatkan pada serangkaian pelat buhul yang memungkinkan pelekatan langsung, dari bagian pembingkai memanjang, diagonal, vertikal, maupun silang.

Fitur penting dari jembatan CH adalah bahwa semua koneksi dibaut, sehingga menghilangkan kebutuhan akan pengerjaan pengelasan di tempat.

Semua elemen jembatan cukup ringkas, dan mudah untuk diangkut melalui jalan darat dan pengoperasian lokasi dapat dilakukan tanpa tenaga terampil maupun alat berat.▼
(beragam sumber).



JEMBATAN CISADANE

Penggantian/Duplikasi Jembatan CH Cisadane memuat sejumlah inovasi. Pengerjaan pondasi (pemancangan dan borepile) dilakukan di atas jembatan eksisting.



Foto:
Dok. DJPI

FAKTA PROYEK JEMBATAN CH

PEMRAKARSA: PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK.

Penggantian dan/atau duplikasi terhadap 37 Jembatan CH eksisting dengan jembatan *Steel Box Girder*, *Steel I Girder*, beserta bangunan pelengkap (termasuk *Structural Health Monitoring System/SHMS*) serta O&M selama masa layanan.



NILAI INVESTASI
2,199 Triliun



JUMLAH LOKASI
37 Tempat



BIAYA KONSTRUKSI
1,814 Triliun



12 Tahun
MASA KONSESI

02 Tahun

MASA KONSTRUKSI

10 Tahun

MASA LAYANAN

SKEMA PROYEK

DBFOMT

Pengembalian investasi dengan skema availability payment (AP)

NILAI AVAILABILITY PAYMENT

HPS 567,8 IDR Miliar
Hasil 525,66 IDR Miliar

TIMELINE PROYEK

19 OKTOBER 2021

PENERBITAN SURAT LELANG

Disampaikan kepada PT Bukaka Teknik Utama Tbk oleh Menteri PUPR

18 NOVEMBER 2021

PEMBENTUKAN BUP PT BAJA TITIAN UTAMA

06 DESEMBER 2021

SIGNING PERJANJIAN KPBU

KELAYAKAN EKONOMI

EIRR: 17,90%
BCR: 1,01

KELAYAKAN FINANSIAL

FIRR: 9,52%
NPV: 14,049 Miliar

LOKASI PENGGANTIAN / DUPLIKASI JEMBATAN



Provinsi Banten

1. Batu Ceper
2. Cisadane A & B
3. Tawing I

Jawa Barat

1. Batu Jajar
2. Ciasem III A
3. Cigadung I
4. Cikao A
5. Cikeruh
6. Cilamaya
7. Cilutung
8. Cimanuk
9. Cipangaritan B
10. Ciputra Haji
11. Cisomang
12. Citanduy
13. Kalijaga A
14. Kanci I B
15. Karang Sembung
16. Sigranela

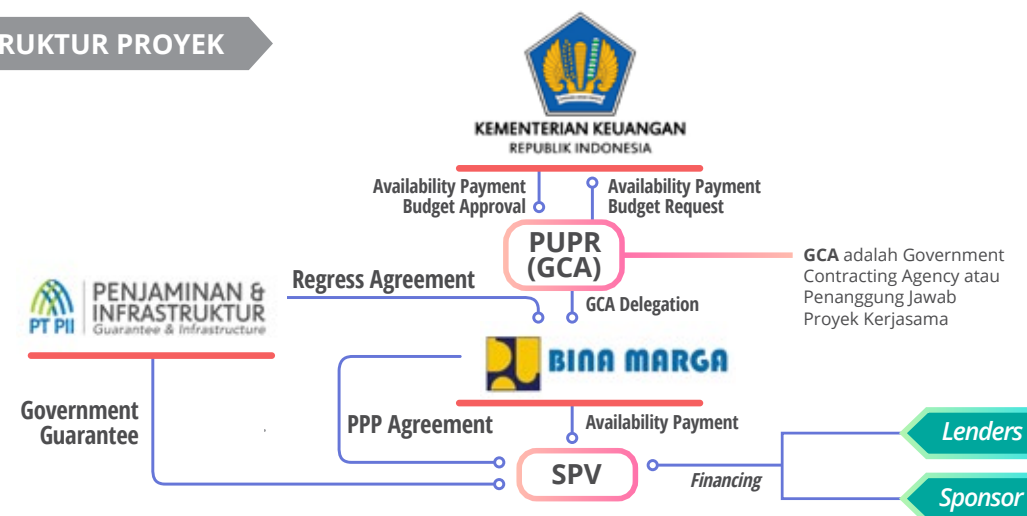
Jawa Tengah

1. Juana I A
2. Jurug A
3. Kalibanger A
4. Pang I
5. Pedes
6. Pamali Brebes B
7. Tajum Margasana
8. Tajum Karangbawang
9. Wonokerto II A

Jawa Timur

1. Bandar Ngalim
2. Jetak
3. Kalitakir
4. Kangkung
5. Munjungan
6. Ngugang
7. Teleng
8. Trisula Lama
9. Wirolegi

STRUKTUR PROYEK





Kementerian PUPR dan World Bank Laksanakan Closing Workshop NAHP

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bekerjasama dengan World Bank (WB)/Bank Dunia melaksanakan acara Closing Workshop National Affordable Housing Program (NAHP) yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (23/05/2021).

Acara workshop ini merupakan forum pertemuan untuk menyampaikan capaian kinerja, pembelajaran dan manfaat pelaksanaan kegiatan NAHP sekaligus menandai telah berakhirnya kerjasama dengan WB melalui program NAHP. NAHP didukung World Bank melalui pinjaman sebesar 450 juta USD.

Program NAHP bertujuan untuk mengatasi tantangan menahun yang dialami oleh penduduk Indonesia dalam mendapatkan rumah yang terjangkau dengan mengembangkan peta jalan yang lebih solid menuju sektor perumahan yang lebih layak, inklusif, aman dan tangguh.

NAHP dilaksanakan sejak Januari 2018 - Februari 2023 dengan target sasaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui tiga komponen yaitu:

- Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT),
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),
- Dukungan Teknis terhadap reformasi program dan kebijakan perumahan.

Program NAHP juga sebagai bentuk implementasi dari kebijakan dan target perumahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Di mana dalam program tersebut menargetkan pengurangan *backlog* kepemilikan rumah dari 13,5 juta menjadi 6,8 juta rumah tangga serta menargetkan penurunan rumah tidak layak huni dari 3,4 juta menjadi 1,9 juta rumah tangga.

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, disebutkan bahwa masih terdapat 61,7% rumah tangga yang menempati hunian tidak layak, berdasarkan empat aspek kelayakan dalam ketahanan bangunan, luas lantai per kapita, air minum, dan sanitasi di mana sebagian di antaranya menempati permukiman kumuh.

Selain itu, NAHP juga dalam rangka memenuhi tujuan SDGs (Sustainable Development Goals)/ Pembangunan yang berkelanjutan.

CAPAIAN KOMPONEN NAHP 2018-2023

Selama periode tahun 2018-2023, capaian komponen BP2BT adalah sebanyak 30.422 rumah tangga dibantu melalui pembiayaan bank dengan total nilai KPR sebesar 225 juta USD, dan melayani pekerja informal sebesar 60% melalui peningkatan kualitas konstruksi.

Capaian komponen BSPS, yaitu: ada sebanyak 233.098 rumah tangga yang dibantu melalui peningkatan kualitas rumah swadaya, sebanyak 67% penerima manfaat telah difokuskan untuk membantu konvergensi penanganan masyarakat miskin ekstrem, penerapan sistem pengendalian kualitas konstruksi *Quality Assurance* dan *Quality Control* (QAQC), teknologi dan inovasi kualitas konstruksi termasuk teknologi ferosemen (*wire mesh*), serta penggunaan teknologi digital melalui e-BSPS.

Capaian komponen dari Dukungan Teknis NAHP adalah: telah menyelesaikan 6 (enam) paket kegiatan studi ataupun kajian yang merupakan masukan terhadap reformasi kebijakan sektor perumahan seperti:

- Sistem Informasi Perumahan dan Real Estate (Housing and Real Estate Information System-HREIS)
- Pengembangan Pembiayaan Sekunder Perumahan,
- Grand Design Kebijakan Perumahan 2020-2045,
- Studi Penyediaan Pasokan Rumah yang Terjangkau,
- Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah (Local Government Capacity Building),
- Kemitraan antara pemerintah dengan Badan Usaha untuk perumahan terjangkau (Private Public Partnership Affordable Housing Framework).



KARAKTER KPR BP2BT

Program KPR BP2BT apabila didalami lebih lanjut memiliki karakteristik antara lain; dapat menyalurkan subsidi ke lebih banyak target sasaran rumah tangga dengan jumlah anggaran yang sama, dibayarkan satu kali sehingga dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang, menggunakan mekanisme dan suku bunga pasar, karena BP2BT berbasis tabungan.

Hal ini dapat meningkatkan modal bank pelaksana hingga tiga kali lipat dari biaya bantuan BP2BT, merupakan subsidi progresif yaitu jumlah bantuan terikat dengan jumlah pendapatan.

Misalnya, pendapatan lebih rendah mendapatkan subsidi lebih tinggi, dilihat dari target sasaran, memiliki kriteria kelayakan berdasarkan pendapatan rumah tangga, dan fokus melayani segmen informal dengan penyaluran BP2BT kumulatif sebesar 60%.

LESSON LEARNED DARI PELAKSANAAN NAHP DI PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Arief Djatmiko yang hadir dalam *Closing Workshop* NAHP memaparkan bahwa pelaksanaan program BSPS dan BP2BT di Provinsi Jawa Tengah, sudah sangat baik.

Tetapi masih terdapat beberapa kendala di antaranya terkait dengan koordinasi

dan pembagian peran antar pemangku kebijakan, *database* penanganan rumah tidak layak huni untuk BSPS, dan sosialisasi kepada masyarakat terkait detail teknis program BP2BT.

Lesson learned yang dapat diambil dari pelaksanaan BP2BT dan BSPS dalam perspektif pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain; diperlukan koordinasi dan pelibatan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan hingga *monitoring* dan evaluasi, diperlukan identifikasi yang akurat serta pemanfaatan sistem yang telah terintegrasi (Simperum dan E-RTLH) secara menerus dan *Bottom up* dari pemerintah Desa-Pemkab-Pemprov-Pusat.

Di samping itu, diperlukan pengawasan dan pengendalian secara berjenjang melalui sistem yang telah dan dapat diintegrasikan, serta diperlukan evaluasi yang melibatkan pemantauan kualitas hunian yang dibangun atau diperbaiki, dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan, serta masukan dari masyarakat penerima bantuan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program untuk dapat kebijakan selanjutnya.

DAMPAK PEMBELAJARAN DARI KERJASAMA NAHP

Dampak dan pembelajaran dari kerjasama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR dan Bank Dunia dalam pelaksanaan NAHP, antara lain: membangun rumah tahan

bencana untuk menyelamatkan jiwa dan memenuhi tujuan SDGs, memperluas dampak program subsidi perumahan pemerintah untuk melayani lebih banyak kebutuhan rumah.

Di samping itu, melayani kebutuhan perumahan bagi segmen yang kurang terlayani dalam skala yang lebih besar, melayani kebutuhan rumah terjangkau yang akut di pusat kota, meningkatkan efektivitas kebijakan dan program perumahan di Indonesia, menjadikan ketahanan iklim sebagai bagian dari solusi perumahan, mendorong inklusivitas gender dimana hampir lebih dari 30% penerima manfaat adalah kepala rumah tangga perempuan.

PELUANG KE DEPAN

Selain itu, terdapat peluang yang perlu dikembangkan untuk ke depannya, yaitu: peningkatan kualitas konstruksi dan ketahanan bencana untuk memitigasi risiko terkait lingkungan dan memastikan keselamatan masyarakat, mobilisasi modal, teknologi, dan kapasitas sektor privat untuk mengurangi beban fiskal dan mempercepat pertumbuhan, prioritas atas segmen yang kurang terlayani untuk memastikan inklusivitas,

Di samping itu, terbuka peluang dukungan untuk perumahan yang lebih terjangkau di area urban dan wilayah metropolitan untuk memenuhi kebutuhan yang



mendesak akan perumahan terjangkau bagi penduduk kota dan mengurangi kemacetan serta emisi Gas Rumah Kaca, penguatan ekosistem pembuatan kebijakan perumahan berbasis bukti dengan data dan analisis untuk memantau hasil dari penanganan *backlog* dan memastikan belanja pemerintah yang efektif dan efisien, dan bergerak menuju sektor perumahan yang 'hijau', berkelanjutan dan tangguh.

Pemerintah berharap dengan adanya *workshop* ini dapat menjadi *benchmarking* dan juga panduan bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan dan strategi penyediaan perumahan untuk RPJPN/RPJMN dimasa yang akan datang.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan NAHP adalah *World Bank*, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Dunia Perbankan, Developer, kelompok masyarakat, para konsultan dan fasilitator yang telah menjadi mitra utama dalam pelaksanaan program NAHP. (Dirangkum dari berbagai sumber) ▼

KICK OFF MEETING THE 10TH WWF 2024: BERAKIT-RAKIT MEMECAH PERSOALAN AIR DARI HULU KE HILIR

World Water Forum (WWF) adalah Forum Internasional yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali, dengan tuan rumah dari negara berbeda.

Pertama kali WWF diadakan tahun 1997 di Marrakesh, Maroko. Sepanjang perjalanannya, WWF telah digelar sebanyak sembilan kali.

Untuk penyelenggaraan WWF ke 10, akan diadakan pada 18-24 Mei 2024 di Bali, Indonesia, dengan mengangkat tema utama "Water For Shared Prosperity".

MENGANGKAT DUA ISU BESAR

Dalam rangka mendukung keberhasilan forum internasional tersebut, Kementerian PUPR turut berpartisipasi mendukung tema utama *Water For Shared Prosperity*, dengan menggelar serangkaian seminar dengan sub tema *Water and Innovative Finance*.

Mengangkat topik diskusi yang beragam untuk membahas dan menemukan solusi dari permasalahan seputar *Blended Financial, Public Private Partnership, Climate and Water Fund*.

Seminar pertama ini mengusung topik *Government Support and Private Sectors*

Perspective on Public Private Partnership for Water Resources Infrastructure yang diselenggarakan di Jakarta pada 7 Februari 2023.

Pada seminar yang digelar secara luring dan daring ini dihadiri pula oleh Ari Setiadi Moerwanto, *Vice Chairman of Program and Session 10th WWF 2024*, Firdaus Ali (Staf Khusus Menteri PUPR bidang Sumber Daya Air) juga narasumber dari Bappenas, ADB, PT Moya Indonesia, K-Water, PwC dan Fauziah Zen (Senior Economist dari ERIA sebagai moderator) beserta undangan lainnya. Acara ini ditayangkan secara *live streaming* melalui Youtube Kementerian PUPR.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna menyampaikan dua isu besar terkait dengan sektor sumber daya air, yaitu isu *upstream* dan isu *downstream*.

"Isu pertama adalah tidak adanya *revenue* pada infrastruktur air di hulu atau *upstream*, sehingga sangat bergantung pada pemerintah, dan kita perlu mencari solusinya!" kata Herry.



Foto:
Dok. DJPI

"Isu lainnya adalah isu Infrastruktur air pada sistem hilir atau *downstream* terkait air minum, bukan hanya regulasi saja, tapi kita perlu melalui banyak perbaikan," ungkap Herry.

Serial Seminar seri pertama berlanjut pada 15 Februari 2023 di Auditorium Kementerian PUPR. Herry Trisaputra Zuna kembali berpartisipasi memimpin diskusi guna mendorong pembiayaan inovatif sektor air di berbagai sisi, baik sisi pemerintah maupun swasta, Lembaga Keuangan, Lembaga Pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya.

"Diperlukan perencanaan terintegrasi yang harus dilakukan mulai dari hulu hingga hilir, sebagai satu kesatuan untuk mencegah kegagalan akibat perencanaan yang parsial. Selain itu, diperlukan *scale up* dan mobilisasi pembiayaan sektor swasta dan juga penerapan *blended financing* yang sudah direncanakan sejak awal proyek," ujar Herry.

Herry juga menambahkan pentingnya *Climate and Resilient Fund*, dalam rangka percepatan pendanaan bencana.

“
dua isu besar
terkait dengan
sektor sumber
daya air, yaitu
isu *upstream*
dan isu
downstream.
”

- HERRY TRISAPUTRA ZUNA -
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan

Foto:
Dok. DJPI

“pengambilan lokasi diskusi di ITB merupakan bukti bahwa sektor air perlu dukungan dari akademisi untuk pemikiran-pemikiran dan inovasi di sektor air.”

- REINI WIRAHADIKUSUMA -
Rektor ITB

Foto Oleh:
Dok. DJPI

PEMBIAYAAN AIR YANG INOVATIF

Road To 10th WWF Side Event berlanjut pada *workshop* kedua yang diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung pada 20 Maret 2023.

Rektor ITB, Reini Wirahadikusuma menyebut, pengambilan lokasi diskusi di ITB merupakan bukti bahwa sektor air perlu dukungan dari akademisi untuk pemikiran-pemikiran dan inovasi di sektor air.

Mengusung topik *Blended Finance for Water Sector*, Herry Trisaputra Zuna dalam *workshop* tersebut menyebut pembiayaan air yang inovatif menjadi isu mendasar untuk memastikan ketahanan air dan mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dalam pidatonya, Herry menyebut pemerintah Indonesia perlu mencari skema pembiayaan yang inovatif sehingga dapat dijangkau masyarakat,

namun tetap menarik pihak swasta. Di sinilah pentingnya dikembangkan *Blended Finance*.

“Blended Finance bagaimana kita mengkombinasikan semua *resources* pembiayaan. Ada yang murah, mahal dan gratis. Karena APBN hanya mampu mendanai sebesar 30 persen. Oleh karena itu kita harus mengembangkan skema pembiayaan yang terjangkau masyarakat!” ▼

DJPI sebagai *Knowledge Center*: Mengawal Masa Depan Pembiayaan Inovatif Infrastruktur PUPR

Oleh: Rizki Akbar Maulana

(Pranata Komputer Ahli Muda – Dit. PPIP)

Infrastruktur yang kuat adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial suatu negara. Di Indonesia, pembangunan infrastruktur merupakan prioritas utama bagi pemerintah dalam menjalankan misi menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.



Foto:
Dok. DJPI

Namun, tantangan yang dihadapi dalam membiayai proyek infrastruktur yang ambisius ini mengharuskan adanya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Hal ini merupakan peran yang sangat penting dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai *Knowledge Center* pembiayaan inovatif bidang pekerjaan umum dan perumahan. Peran utama DJPI adalah pengembangan kebijakan dan strategi pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menghadapi pengembangan pembiayaan infrastruktur yang kompleks, DJPI perlu memantapkan diri bertransformasi menjadi *Knowledge Center* pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

Artinya, DJPI berfungsi sebagai pusat pengetahuan yang mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi terkini mengenai pembiayaan infrastruktur dan praktik terbaik dalam pengelolaannya. *Knowledge Center* DJPI berperan penting dalam menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, sektor swasta, hingga masyarakat umum. Sehingga dapat mendorong kebijakan publik yang partisipatif untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

PERAN STRATEGIS DJPI SEBAGAI *KNOWLEDGE CENTER*

Mengumpulkan dan Menganalisis Data:

Sebagai pusat pengetahuan, DJPI berperan dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data terkait pembiayaan infrastruktur. Data yang akurat dan komprehensif ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan strategis dalam pengembangan proyek infrastruktur.

Penyedia Informasi dan Riset:

DJPI menyediakan informasi yang relevan dan terkini tentang pembiayaan infrastruktur,

baik kepada pemerintah, badan usaha, maupun masyarakat luas. Selain itu, DJPI juga menghasilkan riset dan studi tentang berbagai aspek pembiayaan infrastruktur, memberikan wawasan yang mendalam kepada para pemangku kepentingan.

Mengidentifikasi Potensi Proyek Infrastruktur:

Knowledge Center DJPI memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi proyek infrastruktur yang dapat didukung melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau pembiayaan inovatif lainnya. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan potensi pembangunan, DJPI membantu memilih proyek-proyek yang memiliki dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan sekaligus menciptakan ekosistem bisnis yang baik.

Penyusunan Studi Kelayakan yang Solid:

Sebelum sebuah proyek infrastruktur dapat direalisasikan, perlu dilakukan studi kelayakan yang komprehensif. *Knowledge Center* DJPI berperan dalam memastikan bahwa studi kelayakan ini disusun secara mendalam dan lengkap, sehingga proyek dapat menarik minat investor dan berjalan dengan lancar.

Pendampingan dan Konsultasi:

Proses pembangunan infrastruktur sering kali kompleks dan memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak. DJPI berperan sebagai pendamping yang memberikan bimbingan dan konsultasi kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menghadapi tantangan selama pelaksanaan proyek. Melalui pengetahuan yang dikelola dengan baik, pendampingan dan konsultasi dapat dilakukan secara berkualitas.

Memfasilitasi Kolaborasi:

Sebagai *Knowledge Center*, DJPI berperan dalam memfasilitasi keterlibatan sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan pihak lainnya dalam pembiayaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur.



Foto & ilustrasi:
Freepik.com

“DJPI perlu memantapkan diri bertransformasi menjadi *Knowledge Center* pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.”

- RIZKI AKBAR MAULANA -
Pranata Komputer Ahli Muda - Dit. PPIP

Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban fiskal pemerintah dan mendorong inovasi serta efisiensi dalam pembangunan. Melalui forum diskusi dan pertemuan, DJPI menciptakan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya, sehingga memperkuat sinergi dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.

Pengembangan Model Pembiayaan Inovatif:

DJPI terus berupaya mengembangkan model pembiayaan infrastruktur yang inovatif dan berkelanjutan. Model-model ini mencakup skema KPBU, obligasi infrastruktur, dan instrumen pembiayaan lainnya yang dapat menarik minat investor dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.

TRANSFORMASI MENUJU MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK

Seiring dengan perkembangan zaman, DJPI perlu terus bertransformasi untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dalam pembiayaan infrastruktur. Beberapa upaya transformasi yang perlu menjadi perhatian antara lain:

Digitalisasi:

Teknologi informasi dan komunikasi terus mengalami perkembangan dengan sangat pesat. DJPI harus dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut dalam mengelola data dan informasi. Digitalisasi ini mempermudah akses dan pertukaran informasi bagi para pemangku kepentingan.

Penguatan Jaringan:

Terus memperluas jaringan kerja sama merupakan salah satu kunci menuju masa depan yang lebih baik. Jejaring tersebut meliputi lembaga, organisasi, dan mitra strategis baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini membuka kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta menghadirkan sumber daya tambahan.

Peningkatan Kapasitas SDM:

Selain itu yang tidak kalah penting adalah memberikan perhatian khusus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas. Peningkatan kapasitas ini diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan kompleks dalam pembiayaan infrastruktur.

PENGARUH POSITIF BAGI MASA DEPAN INFRASTRUKTUR INDONESIA

Dalam dunia yang terus berkembang pesat, keberadaan DJPI sebagai *Knowledge Center* pembiayaan inovatif merupakan elemen penting dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Indonesia menuju masa depan yang cerah. Dengan terus beradaptasi, inovatif, dan berkolaborasi, DJPI memiliki peran krusial dalam membawa dampak positif bagi masa depan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan di Indonesia.▼

Foto:
Koleksi Pribadi

KARENA KING KONG, EMPIRE STATE BUILDING JADI GEDUNG ICONIK DUNIA

Dikenal karena tinggi dan keindahan arsitekturnya, ikon ini telah terlihat di lebih dari 250 acara TV, dan lebih dari 50 judul film layar lebar.

ESB tidak hanya digunakan di layar untuk mewakili Kota New York sebagai pusat cakrawala kota, tetapi juga menjadi latar beberapa momen paling klimaks dalam sejarah industri perfilman Hollywood.

ESB dibuka untuk umum pada 11 April 1931. Dua tahun kemudian, sutradara Merian C. Cooper dan Ernest B. Schoedsack menggunakan gedung ini, untuk lokasi syuting film King Kong, dan menghasilkan salah satu momen film paling ikonik dalam sejarah

seluloid lewat film Hollywood hingga hari ini.

KONG BERGELAR KING

Cerita film berawal dari aktor Carl Denham (Robert Armstrong) melakukan ekspedisi Laut Selatan untuk menemukan Kong, gorila setinggi 50 kaki, monster prasejarah untuk dijadikan film dan menghasilkan uang.

Carl ditemani Ann Darrow (Fay Wray) memasuki Pulau Tengkorak. Namun Ann diculik penduduk asli dan dijadikan persembahan bagi Kong. Melihat Ann, Kong jatuh cinta pada perempuan putih berambut pirang itu.

Rombongan ekspedisi berhasil melarikan Ann dengan selamat

Empire State Building (ESB) merupakan bangunan ikonik dalam budaya Amerika. Sekaligus simbol kota New York dan perwujudan kebangkitan Amerika menjadi kekuatan keuangan global di abad ke-20. Kini menjadi salah satu dari lima gedung tertua di New York.

ke kapal. Denham juga berhasil melumpuhkan Kong hingga monster itu pingsan. Kong dibawa dengan rantai ke New York City.

Denham dengan ambisius memamerkan Kong yang kini ditambahi gelar "King" dalam sandiwaya bergaya Broadway. Tetapi Kong melepaskan diri dan mengejar Ann yang dicintainya ke tempat tertinggi di kota metropolis - Empire State Building!

Inilah klimaks klasik. Di mana Kong berubah jadi mahluk mengerikan dan dinyatakan harus mati. Ia diburu puluhan pesawat dengan berondongan tembakan ratusan peluru, ke tubuh Kong yang berdiri dengan penuh murka di puncak gedung.

Foto Oleh:
Freepik.com

Foto Oleh:
Wikipedia



Foto Oleh:
theb1m.com



Sementara Ann Darrow dengan berani berulang-ulang mendekat dan berdiri di depan Kong, demi menghalau tembakan dari pesawat perang.

Adegan pertempuran di puncak Empire State ini sangat mengesankan hati penonton, terutama tatkala kondisi Kong makin lemah dan pelan-pelan mati dengan mata tertutup. Lantas, jatuh dari puncak Empire State Building.

FILM AMBISIUS

Film King Kong versi 1933 menggunakan teknologi *Stop Motion* untuk memperlihatkan banyak gerakan, terutama saat Kong murka di atap Empire State Building.

Film yang memakan *budget* 672,000 USD hampir membuat bangkrut produsernya, RKO Pictures. Jaman itu, jumlah dana sebesar ini merupakan investasi dan pertaruhan sangat besar bagi Produser.

Namun film bisa sukses dan mendapat keuntungan sebesar 5,3 juta dolar. Diduga, keberhasilan ini muncul karena King Kong menunjukkan tren film horror baru, yang dikombinasikan dengan kecanggihan efek khusus komputer (saat itu) dengan konten primitif, sekaligus memamerkan keindahan New York City dari atap Empire State Building.

King Kong diproduksi ulang di tahun 2005 oleh sutradara Peter Jackson.

Foto Oleh:
thecollector.com

Film versi ini memainkan efek lebih canggih menggunakan *Computer-Generated Imagery* (CGI) yang merupakan pencitraan 3D digital dan memberikan efek lebih nyata pada sebuah adegan film. Dan buntutnya menghasilkan keuntungan sebesar 562,9 juta dolar.

Kedua film tersebut dianggap sebagai film paling ambisius dan mahal yang dibuat pada masanya masing-masing.

Terinspirasi dari sukses film King Kong, sejumlah film kemudian mengambil lokasi syuting di sini. Sampai tahun 2023, tercatat lebih dari 50 judul film, antara lain:

An Affair to Remember (by Leo McCarey 1957), Empire (by Andy Warhol 1965), Hercules in New York (by Arthur Allan Seidelman 1980), Sleepless in Seattle (by Nora Ephron 1993), Last Action Hero (by John McTiernan 1993), The Amazing Spider Man (1997-1999) dan lain-lain.▼



DATA FISIK EMPIRE STATE BUILDING

Dibangun	: 1930 selesai 410 hari di 1931
Biaya	: US\$40.948.900
Manajemen	: W& H Properties
Jenis	: Perkantoran, Observasi
Tinggi	
Arsitektural	: 1.250 ft (381,0m)
Pucuk	: 1.454 ft (443,2m)
Atap	: 1.250 ft (381,0m)
Lantai Atas	: 1.224 ft (373,1m)
Observatorium	: 1,224 ft (373,1m)
Jumlah Anak Tangga	: 1.872
Jumlah Lantai	: 102
Jumlah Lift	: 73 Lift Otis
Arsitek	: Shreve Lamb dan Harmon
Pengembang	: John J. Raskob
Teknisi Struktural	: Homer Gage Balcon
Kontraktor Utama	: Starret Brother and Eken
Gaya Artistektur	: Art Deco
Alamat	: 20 W 34 th St., New York, NY 10001, USA

Foto Oleh: bowmanconstructors.com



Foto Oleh:
TCM.com

3 Fun FACTS EMPIRE STATE BUILDING

Desain Art Deco nya terinspirasi dari bentuk pensil

Tiang atasnya dulunya adalah tiang tambat untuk kapal udara

Gedung Empire State Rusak Selama Perang Dunia II



**BENDUNGAN TAPIN
BANJARMASIN,
Kalimantan Selatan**

Bendungan Tapin merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Selatan memiliki kapasitas 56,77 juta meter kubik ini dapat memberikan manfaat untuk program pengairan lahan pertanian setempat seluas 5.472 hektar dan juga diharapkan dapat mengendalikan banjir di Kabupaten Tapin.

Selain memiliki manfaat untuk pengendalian banjir di Kabupaten Tapin, keindahan Bendungan Tapin dapat juga berfungsi sebagai konservasi air, dan dikembangkan sebagai destinasi wisata kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Kalimantan Selatan.

Foto:
Dok. DJPI



JURUG A, Jawa Tengah

Dulu, jembatan Jurug hanya bisa dilalui kendaraan roda dua dan pejalan kaki. Di malam hari kondisinya gelap karena minim penerangan.

Foto:
Dok. DJPI



GEDUNG UTAMA KEMENTERIAN PUPR, DKI JAKARTA

Tampak samping Gedung Utama Kementerian PUPR. Dibangun dengan konsep *green building* dengan estimasi penghematan listrik sekitar 40 persen dan penghematan konsumsi air hingga 35 persen. Desain keseluruhan gedung memperhatikan lebih banyak penerangan alami dari sinar matahari pada siang hari serta menerapkan sensor penerangan yang secara otomatis akan mematikan lampu ketika tidak ada orang di ruangan.

Foto:
Dok. DJPI



SPAM UMBULAN di PASURUAN, JAWA TIMUR

Sumber air baku SPAM Umbulan berasal dari mata air Umbulan di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan yang disalurkan melalui pipa transmisi air bersih sepanjang 93 Km dengan total 14 titik *reservoir offtake*.

Foto:
Dok. DJPI

28 APRIL 2023

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melantik dua Pejabat Administrator DJPI PUPR, Ary Rahman Wahyudi (Kepala Subdirektorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur PSSPP, DJPI) dan Fina Syafinas (Kepala Subdirektorat Koord Kerja Sama Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan).

02 MEI 2023

Jajaran Pejabat dan Pegawai DJPI mengikuti acara Halal Bihalal Idul Fitri 1444 H, secara *online* bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di lapangan Sapta Taruna. Acara ini juga digelar secara *online* melalui zoom.

05 MEI 2023

DJPI PUPR memfasilitasi koordinasi terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Rusunami Perum Perumnas Semesta Mahata Margonda Depok dengan pihak Perum Perumans, Pemkot Depok, Dirjen Cipta Karya & BP Tapera.

16 MEI 2023

DJPI melaksanakan *Market Consultation* untuk dua proyek KPBK atas Prakarsa Pemerintah, yakni Proyek KPBK Jalan Tol Demak Tuban dan Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik. Hadir tujuh perusahaan yang menyampaikan *Letter of Intent*.

31 MEI 2023

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyambut kehadiran 95 orang investor dari Singapura di area Proyek Pembangunan IKN yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan Singapore Business Visit to IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Menteri Basuki berharap pengusaha Singapura tidak ragu mengambil keputusan berinvestasi dalam pengembangan IKN Nusantara. "Kami harap kunjungan ini akan berkesan bagi Singapura dan yang paling penting, jangan hanya sekadar tertarik, tetapi mulai mengambil keputusan untuk berinvestasi. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk eksekusi," kata Menteri Basuki.

31 MEI - 02 JUNI 2023

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan perumahan (Dirjen PI), PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menghadiri acara 9th *Global Affordable Housing Conference* (Konferensi Perumahan Terjangkau Global ke-9) yang diselenggarakan 31 Mei - 2 Juni di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam kesempatan itu Dirjen PI menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan pembangunan perumahan yang terjangkau sendirian. "Kami butuh dukungan dari sektor swasta, agar program pemerintah dapat mencapai hasil maksimal."

7 JUNI 2023

Direktur Pelaksana Pembiayaan Infrastruktur Pemukiman DJPI Meike Kencanawulan Martawidjaya menjadi narasumber dalam acara water.org dengan tema "Bagaimana Mengatasi Keterbatasan Dana Untuk Infrastruktur Air Minum di Jakarta."



APAKAH PESERTA TAPER MENDAPAT SUBSIDI SBUM?

PERTANYAAN

SISKA MUSTIKA ELIA D :

Assalamu'alaikum, selamat sore admin DJPI, perkenalkan saya Siska Konsumen KPR subsidi melalui tapera, mohon maaf, saya ingin mengkonfirmasi apakah peserta tapera tidak mendapat subsidi SBUM dari pemerintah? Karena dalam proses pengajuan KPR subsidi saya diinformasikan seperti itu, mohon tanggapannya, terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

JAWABAN

MIMIN DJPI :

Wa 'alaikumus salam, terima kasih telah menyampaikan pertanyaan kepada kami, terkait hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa saat ini di BP Tapera terdapat dua program KPR, jika ibu memanfaatkan KPR Tapera maka ibu tidak mendapatkan SBUM, sedangkan jika ibu memanfaatkan KPR Sejahtera FLPP maka ibu dapat mengajukan SBUM dikarenakan masing masing program memiliki nilai manfaat yang berbeda beda yang ditawarkan kepada penerima manfaat, demikian, terima kasih

LEBIH DEKAT DENGAN KAMI



Manfaatkan layanan daring
untuk menanyakan atau berkonsultasi
seputar pelayanan publik
di kementerian PUPR

Melalui email, telepon dan website:



informasi@pu.go.id



Call Center 158



sahabat.pu.go.id

Melalui sosial media:

@pupr_Pembiayaan





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Website
pembiayaan.pu.go.id

Twitter
[@pupr_Pembiayaan](https://twitter.com/pupr_Pembiayaan)

Instagram
[@pupr_Pembiayaan](https://www.instagram.com/pupr_Pembiayaan)

YouTube
[pupr_pembiayaan](https://www.youtube.com/pupr_pembiayaan)